

Intervensi Asing Terhadap Gerakan Separatis KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) Papua Pada Tahun 2015-2022

Palmer Wilibald Beking Cornellisen^{1*}, Yeyen Subandi¹

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author : lisenbeking290@gmail.com

Article History:

Received : 10-12-2025

Accepted : 17-12-2025

Keywords: Separatis; Intervensi Asing; Keamanan Non Tradisional; Pemerintah Indonesia

ABSTRAK

Gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan konflik berkepanjangan yang tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan domestik, tetapi juga mengalami internasionalisasi melalui keterlibatan aktor-aktor eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara sistematis bentuk dan dinamika intervensi asing terhadap gerakan separatis KKB Papua pada periode 2015–2022 serta implikasinya terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari literatur ilmiah, laporan pemerintah, dokumen organisasi internasional, publikasi lembaga non-profit, dan sumber daring kredibel yang diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi tertentu. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik dengan menggunakan perspektif keamanan non-tradisional dalam kajian Hubungan Internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi asing terhadap isu Papua bersifat non-tradisional, meliputi tekanan diplomatik, dukungan politik transnasional, dan pemanfaatan isu hak asasi manusia di forum internasional, yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap penguatan eksistensi gerakan separatis KKB. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dinamika intervensi asing tersebut menimbulkan tantangan serius bagi pemerintah Indonesia dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang komprehensif melalui pendekatan keamanan, dialog inklusif, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia guna meredam eskalasi konflik serta mencegah meluasnya pengaruh aktor eksternal.

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata di Papua yang melibatkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) merupakan salah satu tantangan keamanan serius bagi Indonesia dalam satu dekade terakhir. Eskalasi kekerasan yang terjadi pada periode 2015–2022 tidak hanya berdampak pada korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi masyarakat sipil serta memperumit upaya stabilisasi keamanan di wilayah tersebut. Serangkaian serangan bersenjata, termasuk insiden pada awal tahun 2021 yang mengakibatkan korban dari kalangan sipil dan aparat keamanan, menunjukkan bahwa konflik Papua telah berkembang menjadi isu keamanan yang berlarut dan kompleks (Amanda & Pramono, 2023).

Dalam kajian Hubungan Internasional, separatisme tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan domestik, melainkan sebagai bagian dari isu keamanan non-tradisional yang melibatkan aktor negara dan non-negara lintas batas. Pendekatan keamanan non-tradisional menekankan konsep *comprehensive security*, yaitu ancaman terhadap negara yang tidak hanya bersumber dari kekuatan militer, tetapi juga dari tekanan politik, ekonomi, sosial, dan

internasional (Chalk, 2000). Dalam konteks Papua, gerakan separatis yang sebelumnya dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kemudian dikategorikan pemerintah Indonesia sebagai KKB, menunjukkan dinamika konflik yang tidak terlepas dari faktor historis, politik identitas, dan ketimpangan pembangunan.

Selain faktor domestik, konflik Papua juga mengalami proses internasionalisasi. Isu hak asasi manusia, penentuan nasib sendiri, serta eksploitasi sumber daya alam kerap diangkat dalam berbagai forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada periode 2015–2022. Narasi tersebut mendorong keterlibatan aktor asing, baik negara maupun organisasi non-negara, dalam bentuk dukungan diplomatik, advokasi internasional, dan tekanan politik terhadap pemerintah Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik Papua tidak hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga berimplikasi pada posisi Indonesia dalam dinamika politik global.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas konflik dan separatisme di Papua, sebagian besar kajian masih menempatkan isu ini sebagai persoalan keamanan domestik. Kajian yang secara sistematis mengulas peran intervensi aktor asing dalam mendukung gerakan separatis Papua, khususnya dalam perspektif keamanan non-tradisional, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola intervensi aktor asing terhadap gerakan KKB di Papua pada periode 2015–2022 serta implikasinya terhadap keamanan nasional Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* terhadap berbagai sumber data sekunder, meliputi laporan pemerintah, publikasi akademik, laporan organisasi non-profit, serta publikasi daring yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan studi keamanan non-tradisional serta menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dalam menangani konflik separatis yang melibatkan aktor non-negara dan dinamika internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review*. Metode ini dipilih untuk menganalisis secara komprehensif berbagai temuan penelitian, laporan, dan dokumen yang relevan dengan isu intervensi aktor asing terhadap gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pada periode 2015–2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, kecenderungan, serta dinamika intervensi asing dalam perspektif keamanan non-tradisional Hubungan Internasional.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, baik daring maupun luring, meliputi buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan pemerintah, laporan organisasi non-profit internasional, serta publikasi daring yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menetapkan kriteria inklusi, yaitu sumber yang membahas konflik Papua, separatisme, keamanan non-tradisional, serta keterlibatan aktor internasional dalam periode penelitian.

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan, seleksi, klasifikasi, dan interpretasi data secara tematik. Data yang telah terpilih dianalisis untuk menjelaskan bentuk dan pola intervensi aktor asing serta implikasinya terhadap keamanan nasional Indonesia. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang holistik

dan kontekstual terhadap fenomena separatisme Papua dalam dinamika keamanan non-tradisional.

PEMBAHASAN

Pola Kekerasan KKB sebagai Ancaman Keamanan Non-Tradisional

Hasil kajian menunjukkan bahwa eskalasi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua sepanjang periode 2015–2022 memperlihatkan karakteristik ancaman keamanan non-tradisional. Kekerasan yang dilakukan tidak hanya menyasar aparat keamanan negara, tetapi juga masyarakat sipil, infrastruktur publik, serta simbol-simbol kehadiran negara. Pola ini menimbulkan dampak multidimensional, meliputi kerusakan fisik, instabilitas sosial, serta trauma psikologis yang berkepanjangan bagi masyarakat setempat.

Dalam perspektif keamanan non-tradisional, ancaman tidak semata-mata diukur dari agresi militer antarnegara, melainkan dari gangguan terhadap stabilitas politik, keamanan manusia (*human security*), dan kohesi sosial. Kekerasan KKB berfungsi sebagai instrumen politik untuk membangun narasi ketidakamanan, sekaligus memperkuat klaim adanya konflik struktural antara negara dan masyarakat Papua. Dengan demikian, tindakan kekerasan tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kriminalitas, melainkan sebagai bagian dari strategi separatis yang berdimensi politik.

Internasionalisasi Isu Papua dan Dukungan Aktor Eksternal

Temuan penelitian menunjukkan bahwa isu Papua mengalami proses internasionalisasi yang signifikan, terutama melalui forum-forum internasional dan jaringan advokasi transnasional. Dukungan terhadap gerakan separatis Papua tidak hanya datang dari aktor non-negara, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan jaringan solidaritas internasional, tetapi juga memperoleh resonansi dari sejumlah negara di kawasan Pasifik.

Bentuk dukungan tersebut umumnya tidak muncul dalam format intervensi militer langsung, melainkan melalui mekanisme diplomatik, wacana hak asasi manusia, serta tekanan politik di forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Negara-negara tertentu secara konsisten mengangkat isu Papua dalam sidang internasional dengan menekankan narasi pelanggaran HAM dan hak penentuan nasib sendiri. Pola ini mencerminkan bentuk intervensi tidak langsung (*indirect intervention*) yang berpotensi memengaruhi persepsi global terhadap legitimasi kedaulatan Indonesia atas Papua.

Dalam kerangka hubungan internasional, fenomena ini sejalan dengan konsep intervensi non-tradisional, di mana aktor eksternal memanfaatkan isu kemanusiaan dan HAM sebagai instrumen untuk memberikan tekanan politik terhadap negara berdaulat. Internasionalisasi isu Papua sekaligus membuka ruang legitimasi simbolik bagi kelompok separatis untuk memperkuat klaim perjuangan mereka di tingkat global.

Dimensi Historis dan Politik Separatisme Papua

Secara historis, akar separatisme di Papua tidak dapat dilepaskan dari dinamika integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontestasi narasi sejarah terkait Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 terus menjadi sumber legitimasi politik bagi kelompok separatis. Narasi tersebut direproduksi secara berkelanjutan dalam wacana

internasional untuk menggambarkan Papua sebagai wilayah yang mengalami kolonialisasi modern.

Dalam konteks kontemporer, kebijakan negara seperti otonomi khusus dan pemekaran wilayah administratif belum sepenuhnya mampu meredam ketegangan politik. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap tidak partisipatif justru dimanfaatkan oleh aktor separatis dan pendukung internasionalnya untuk memperkuat narasi ketidakadilan struktural. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor domestik dan internasional saling berkelindan dalam memperkuat dinamika separatisme di Papua.

Intervensi Asing sebagai Tantangan terhadap Kedaulatan Negara

Hasil analisis menunjukkan bahwa intervensi asing dalam isu Papua lebih banyak beroperasi pada level normatif dan diskursif dibandingkan intervensi koersif. Meski demikian, dampaknya terhadap kedaulatan negara tetap signifikan. Tekanan internasional yang terus-menerus berpotensi membatasi ruang kebijakan pemerintah Indonesia, khususnya dalam menangani konflik Papua melalui pendekatan keamanan.

Dalam perspektif keamanan non-tradisional, intervensi asing semacam ini menimbulkan dilema kebijakan bagi negara. Di satu sisi, negara dituntut untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan wilayah; di sisi lain, negara menghadapi tekanan internasional untuk memenuhi standar HAM global. Ketegangan ini memperlihatkan bahwa konflik Papua tidak hanya merupakan persoalan domestik, tetapi juga bagian dari dinamika politik global.

Implikasi terhadap Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa respons pemerintah Indonesia terhadap gerakan KKB dan dukungan internasionalnya perlu melampaui pendekatan keamanan konvensional. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek militer berpotensi memperkuat narasi represivitas yang kerap digunakan oleh aktor separatis dalam forum internasional.

Sebaliknya, strategi kebijakan yang lebih komprehensif—dengan mengintegrasikan pendekatan keamanan manusia, keadilan sosial, dan diplomasi internasional—menjadi kebutuhan mendesak. Penguatan diplomasi proaktif di forum internasional, peningkatan transparansi kebijakan di Papua, serta pelibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan merupakan langkah strategis untuk mereduksi legitimasi intervensi asing dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Sintesis Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa gerakan separatis KKB di Papua tidak dapat dilepaskan dari dinamika intervensi asing yang bersifat non-tradisional. Kekerasan KKB, internasionalisasi isu Papua, serta tekanan diplomatik internasional membentuk satu kesatuan dinamika yang saling memperkuat. Dalam konteks hubungan internasional kontemporer, konflik Papua merepresentasikan tantangan kompleks yang menuntut respons kebijakan multidimensional dari negara.

KESIMPULAN

Gerakan separatis Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua merupakan fenomena konflik berkepanjangan yang berakar pada tuntutan pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangannya tidak hanya ditandai oleh eskalasi kekerasan

dan tindakan kriminal yang berdampak langsung pada keamanan masyarakat sipil, tetapi juga oleh upaya internasionalisasi isu Papua melalui berbagai forum global.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia, seperti penerapan Otonomi Khusus Papua, belum sepenuhnya mampu mereduksi resistensi KKB. Sebaliknya, dinamika konflik semakin kompleks seiring dengan munculnya dukungan dari aktor internasional, baik berupa komunitas transnasional maupun negara asing, yang memanfaatkan isu hak asasi manusia sebagai instrumen diplomatik. Kondisi ini mencerminkan bentuk intervensi non-tradisional yang berpotensi mengancam kedaulatan negara.

Penelitian ini menegaskan bahwa intervensi asing dalam konflik Papua tidak dapat dilepaskan dari kepentingan geopolitik dan ekonomi, mengingat posisi strategis Papua serta kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya. Apabila tidak dikelola secara cermat, situasi ini berpotensi menciptakan preseden yang mendorong munculnya tuntutan serupa di wilayah lain dalam bingkai negara multikultural seperti Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan konflik yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya menekankan pendekatan keamanan, tetapi juga mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, dialog inklusif, serta penguatan legitimasi kebijakan negara. Upaya tersebut perlu disertai dengan peningkatan literasi kebangsaan guna memperkuat nilai persatuan dan mencegah berkembangnya pengaruh eksternal yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amalia, T. Y., Asy'ari, F. M., & Raihansyah, F. N. (2025). Pendekatan soft dan hard power dalam peacebuilding sebagai resolusi konflik antara Pemerintah Indonesia dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). *Mondial: Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1).
- [2] Amanda, M. R., & Pramono, B. (2023). Resolusi konflik kelompok kriminal bersenjata Papua. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 971–984.
- [3] Ami, H. S. (2022). *5 negara Pasifik yang mendukung Papua Merdeka, kerap kritik Indonesia di PBB*. iNews.id.
- [4] Arbar, T. F. (2020). *Baiknya RI, hibahkan Rp29,41 M bantu pandemi 3 negara*. CNBC Indonesia.
- [5] Chalk, P. (2000). *Non-military security and global order*. Palgrave Macmillan.
- [6] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Pustaka Pelajar.
- [7] Dewi, N. (2021). *Pendekatan baru Panglima Andika tangani Papua: Satgas TNI jalankan tugas pokok*. Tempo.co.
- [8] Dreli, S. (2014). *The influencing factors of Melanesian Spearhead Group stand of West Papua political freedom* (Master's thesis). Wallonia University.
- [9] Hasan, A. M. (2017). *Dukungan internasional untuk Papua Merdeka*. Tirto.id.
- [10] Human Rights Monitor. (2023). *West Papua annual report 2022*. Human Rights Monitor.
- [11] Jackson, R. T., & Standish, W. (2023). Counting the homeless in Papua New Guinea 2024 population and housing census. *Interdisciplinary Journal of Rural and Community Studies*.

- [12] Mardiani, P. I., Anisah, I., Hasibuan, M., & Fadilah, N. (2021). Konflik internal antara Pemerintah Indonesia dengan gerakan separatis di Papua. *Syntax Fusion: Jurnal Nasional Indonesia*.
- [13] May, R. J. (2001). *State and society in Papua New Guinea: The first twenty-five years*. ANU E Press.
- [14] Mutia, A. (2023). *Mari kenali apa itu KKB Papua, dari sejarah sampai tujuannya*. Inilah.com.
- [15] Nainggolan, P. P. (2014). Aktivitas internasional gerakan separatisme Papua. *Jurnal DPR RI*.
- [16] Nugroho, E. P. P. W. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif*. Pustaka Pelajar.
- [17] Panuntun, A. B. E. N. I. (2022). *Riset: Kelompok separatisme dominasi aksi kekerasan di Papua sejak 2010, pemerintah perlu introspeksi diri*. The Conversation Indonesia.
- [18] Rifan, A. (2022). *Menilik apa tujuan KKB Papua yang sebenarnya dan sejarah gerakan separatis di Bumi Cenderawasih*. Suara.com.
- [19] Rohim, N. (2014). Optimalisasi otonomi khusus Papua dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menghindari konflik dan kekerasan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- [20] Sinaga, U. M. (2021). Konflik separatisme Papua dan implikasinya terhadap hubungan diplomasi Indonesia–Australia. *JOM FISIP*, 8(2).
- [21] Wulandari, R. (2024). *Otonomi khusus Papua*. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
- [22] Yusri, A. M. A., Tahamata, L. C. O., & Waas, R. M. (2023). Intervensi Republik Vanuatu dalam persoalan Papua perspektif hukum internasional. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(5).